

## **ABSTRAK**

Seseorang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tertentu, tidak menyerahkan seluruh uang hasil penjualan kepada perusahaan yang diterimanya dari pembeli yang memang telah dipercayakan kepadanya, karena ada hubungan kerja, tanpa seijin dari perusahaan uang tersebut dipergunakannya untuk diri sendiri, melakukan tindakan pemilikan uang tanpa hak oleh karenanya dipersalahkan melakukan penggelapan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan dalam Putusan Perkara No. : 88/Pid.B/2016/PN.Pwt.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian deskriptif analisis, Sumber Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan serta Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Putusan Perkara No. : 88/Pid.B/2016/PN.Pwt Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Purwokerto dalam Putusan Perkara No. : 88/Pid.B/2016/PN.Pwt, telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim secara tepat dan benar antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) ini, selama persidangan berlangsung, tidak dijumpai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan dalam Putusan Perkara No. : 88/Pid.B/2016/PN.Pwt, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1) Pertimbangan terhadap fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP, dan terhadap alat bukti sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP telah memenuhi syarat minimal alat bukti yaitu berupa : keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, 2) Pertimbangan sosiologis terhadap terdakwa, pertimbangan non yuridis yang melekat pada diri pelaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yaitu : telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

## **ABSTRACT**

*Someone acting for and on behalf of certain company, not deliver entire sales revenue money to accepted company from buyer which is true have been entrusted to it, caused by activity relation, without permission from company the money utilizing of for the ownself of, to conducting action ownership money without rights for the reason blamed to conduct embezzlement.*

*This research aim to to know applying embezzlement doing an injustice elements and to know consideration base punish Purwokerto judge of district court in dropping embezzlement doing an injustice decision in Verdict No : 88/Pid.B/2016/PN.Pwt.*

*Research conducted by using method approach normatif yuridis. Specification of descriptive Research analysis, Source of Data sekunder cover law and regulation going into effect, literature, result of research related to problems fundamental and also Decision District Court Purwokerto Verdict No : 88/Pid.B/2016/PN.Pwt Data collecting with bibliography study, presented in the form of description and analysed with normatif method qualitative.*

*Pursuant to result of research known that applying embezzlement doing an injustice elements District Court Purwokerto in Verdict No : 88/Pid.B/2016/PN.Pwt, have been considered and proved by Ceremony Judge precisely and real correct between expressed law fact conference with embezzlement doing an injustice elements (Section 372 KUHP) asserted by Publik Prosecutor. In applying embezzlement doing an injustice elements (Section 372 KUHP) this, during conference take place, not meet the reason of pembedan reason and also forgiving able to vanish the nature of contempting of court and also crime responsibility defendant x'self, hence defendant expressed to make a mistake, and fallen crime as according to its deed.*

*Consideration base punish judge in dropping embezzlement doing an injustice decision in Verdict No : 88/Pid.B/2016/PN.Pwt, Ceremony Judge of district court Purwokerto in dropping crime have considered the followings 1) Consideration to law fact fulfilling elements as formulated in Section 372 KUHP, and to evidence appliance as commended in Section 184 sentence (1) KUHP have up to standard minimize evidence appliance that is in the form of : eyewitness boldness, letter, and defendant boldness 2) Sosiologis consideration to defendant, consideration of is non coherent yuridis perpetrator x'self, pursuant to Section 197 sentence (1) KUHP f letter that is : have considered things weighing against and lightening defendant. Judge souncil let fall crime to defendant with crime serve a sentence during 8 (eight) month.*